



**PERANAN KONGRES PEREMPUAN INDONESIA PADA
MASA PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA
TAHUN 1928-1941**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan mencapai gelar Sarjana Kependidikan

Oleh

Isnan Hidayatur R.

NIM 080210302028

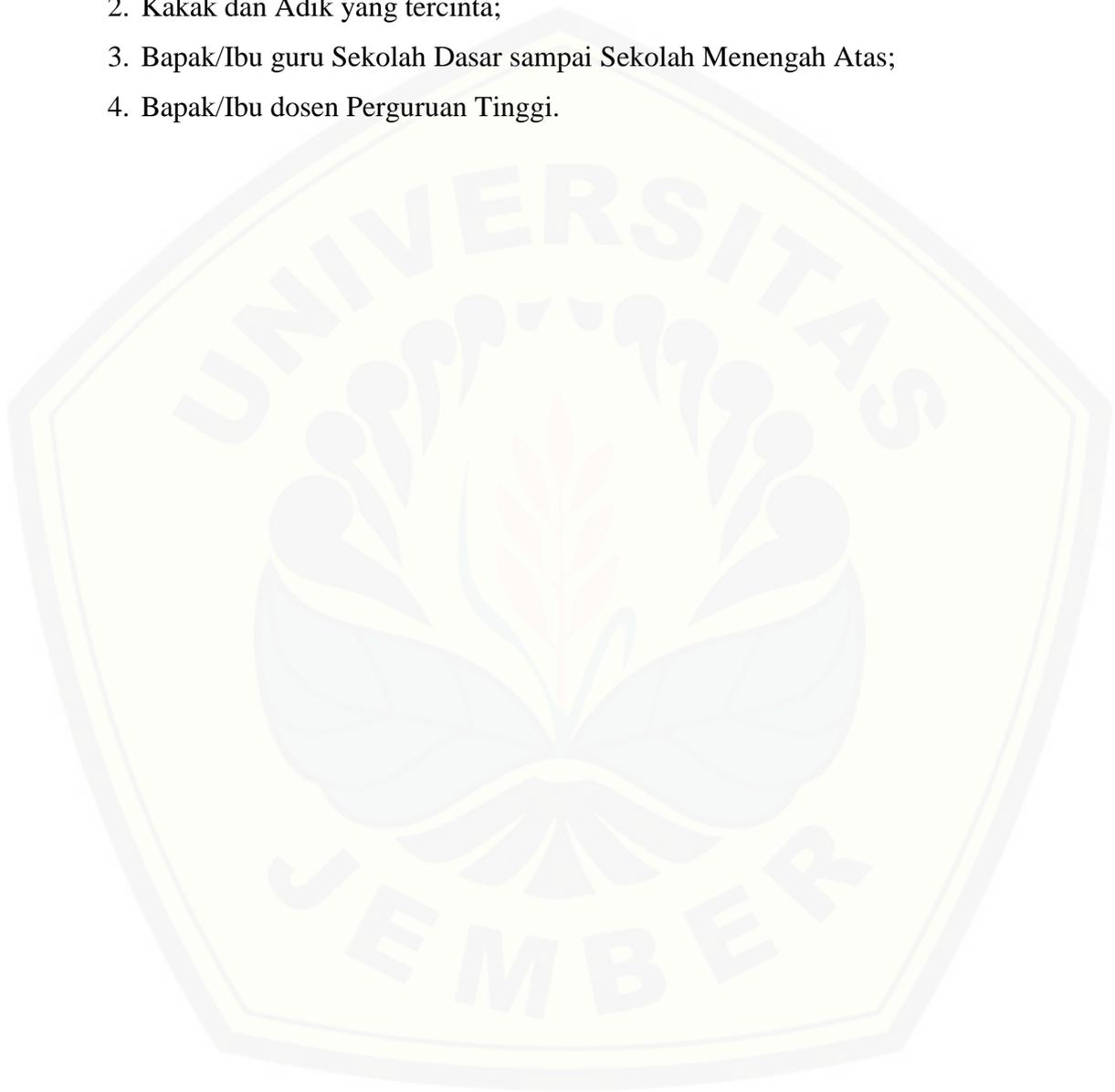
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Ibunda E. Burhani Atin dan Ayahanda Untung yang tercinta;
2. Kakak dan Adik yang tercinta;
3. Bapak/Ibu guru Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas;
4. Bapak/Ibu dosen Perguruan Tinggi.



MOTO

Bekerjalah bahu membahu untuk mewujudkan kegembiraan, karena motivasi selalu muncul dari kegembiraan. Sedangkan kegembiraan hanya dapat ditemukan dalam kerja bersama^{*)}



^{*)} Ir. Andi Muzaki, SH.MT.2011. *Motivasi Net Edisi Baru*. Jakarta: Private library.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Isnan Hidayatur R.

NIM : 080210302028

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peranan Kongres Perempuan Indonesia pada Masa Pergerakan Nasional Indonesia tahun 1928-1941” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Desember 2015

Yang menyatakan,

Isnan Hidayatur R.

NIM 080210302028

SKRIPSI

**PERANAN KONGRES PEREMPUAN INDONESIA PADA
MASA PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA
TAHUN 1928-1941**

Oleh

Isnan Hidayatur R.

NIM 080210302028

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Sri Handayani, M.M.

Dosen Pembimbing II : Dr. Muhammad Na'im, M.Pd.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peranan Kongres Perempuan Indonesia pada Masa Pergerakan Nasional Indonesia tahun 1928-1941 “ telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 30 Desember 2015

tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Sri Handayani, M.M.

NIP 1985 03 195212012 002

Dr. Muhammad Na'im, M.Pd.

NIP 19660328 200012 1 001

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Sumarno, M. Pd.

NIP 19522104 198403 1 002

Prof. Dr. Bambang Soepeno, M.

Pd NIP 196006121 98702 1 001

Mengesahkan

Dekan,

Prof. Dr. Sunardi, M.Pd.

NIP 195405011983031005

RINGKASAN

Peranan Kongres Perempuan Indonesia Pada Masa Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1928-1941; Isnan Hidayatur R, 080210302028; 2015: 54+xii halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Pergerakan wanita Indonesia menjadi salah satu pergerakan nasional yang belum banyak dikaji. Pergerakan wanita Indonesia awal masa pergerakan nasional bersatu dan terkumpul dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama di Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) pergerakan wanita Indonesia pada masa pergerakan nasional, (2) pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama, dan (3) perkembangan Kongres Perempuan Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Menurut Kunowijoyo yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama ialah menentukan topik penelitian. Tahap kedua ialah heuristik atau pengumpulan sumber penelitian, Tahap ketiga ialah verifikasi atau kritik sumber. Tahap keempat ialah tahap interpretasi yaitu proses menafsirkan fakta-fakta sejarah yang ditemukan. Tahap terakhir ialah historiografi atau penulisan sejarah. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut, (1) pergerakan wanita Indonesia masa pergerakan nasional terjadi karena adanya semangat kebangsaan yang tumbuh dan berkembang saat masa penjajahan.

Banyak hambatan yang dihadapi oleh kaum wanita untuk dapat menentukan sendiri kehendaknya mendorong terjadinya pergerakan wanita. Pergerakan wanita Indonesia masa pergerakan nasional terbagi menjadi tiga periode yakni periode sebelum tahun 1920, periode tahun 1920-1930 dan periode sesudah tahun 1930 dengan latar belakang masing-masing periode yang berbeda, (2) pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama terjadi pada 22-25 Desember 1928 di Dalem Joyodipuran, Yogyakarta dengan latar belakang untuk menyatukan gerakan organisasi wanita. Organisasi wanita saling membulatkan tekad untuk mendukung persatuan Indonesia. Kongres berlangsung dengan berbagai agenda acara dan pertemuan serta menghasilkan beberapa keputusan penting menyangkut kehidupan wanita Indonesia, dan (3) perkembangan Kongres Perempuan

Indonesia selanjutnya berlanjut pada Kongres Perempuan Indonesia Kedua, Kongres Perempuan Indonesia Ketiga, dan Kongres Perempuan Indonesia Keempat.

Simpulan penelitian ini, bahwa Pergerakan wanita sebenarnya bahkan terjadi sebelum masa pergerakan nasional. Pergerakan wanita dimulai masa penjajahan Belanda sampai pada saat ini. Pergerakan wanita sebelum tahun 1920/awal abad XX identik dengan pergerakan dalam bidang sosial dan pendidikan. Selanjutnya, organisasi wanita semakin luas orientasinya terutama dalam menjangkau masyarakat bawah dan tujuan politik dilakukan bersama-sama antara organisasi sosial dan politik. Sampai pada puncaknya kaum perempuan menyatakan mendukung penuh tuntutan "Indonesia Berparlemen" dari Gabungan Politik Indonesia (GAPI) serta hak untuk mempersiapkan diri secara militer menghadapi perang mendatang.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Kongres Perempuan Indonesia pada Masa Pergerakan Nasional Indonesia tahun 1928-1941”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Sunardi, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
3. Dr. Sukidin, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pengetahuan Ilmu Sosial;
4. Dr. Sri Handayani, M.M., selaku Dosen Pembimbing I, Dr. Muhammad Na'im, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. sahabat/ sahabati PMII Rayon FKIP UNEJ yang telah memberikan motivasi dan semangat;
6. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

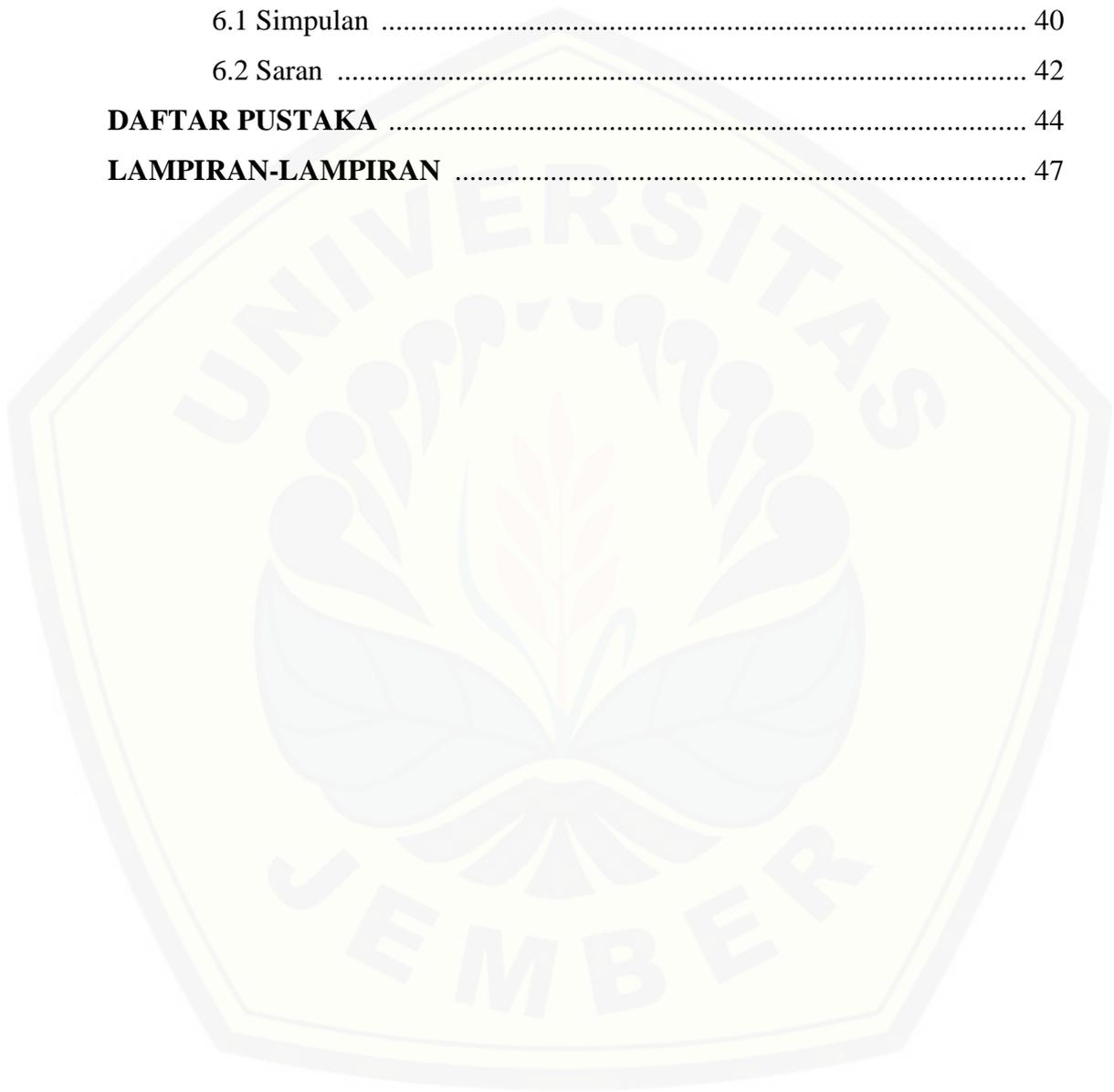
Jember, 30 Desember 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	x
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Penegasan Judul	5
1.6 Ruang Lingkup Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB 3. METODE PENELITIAN	12
BAB 4. PERGERAKAN WANITA MASA PERGERAKAN NASIONAL	17
4.1 Timbulnya Pergerakan Nasional	17
4.2 Periode Pergerakan Wanita Indonesia	19
4.2.1 pergerakan wanita tahun 1908-1920	19
4.2.2 pergerakan wanita tahun 1920-1930	23
4.2.3 pergerakan wanita tahun 1930-1941	27
BAB 5. PERAN KONGRES PEREMPUAN INDONESIA	29
5.1 Kongres Perempuan Indonesia Pertama	29

5.2 Kongres Perempuan Indonesia Kedua	31
5.3 Kongres Perempuan Indonesia Ketiga	35
5.4 Kongres Perempuan Indonesia Keempat	37
BAB 6. PENUTUP	40
6.1 Simpulan	40
6.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN	47



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. MATRIKS PENELITIAN	47
B. GAMBAR-GAMBAR	48
B. 01: Panitia inti Kongres Perempuan Indonesia Pertama	48
B. 02: R.A. Soekonto, Ketua Kongres Perempuan Indonesia Pertama	49
B. 03: Pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama di Yogyakarta	50
B. 04: Diorama Pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama	51
B. 05: Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung	52
C. SUSUNAN PENGURUS KONGRES PEREMPUAN INDONESIA PERTAMA	53

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesadaran nasional bukan merupakan hak dan monopoli kaum lelaki saja, namun kaum wanita pun berhak dan berkewajiban untuk ikut terjun dalam kancah perjuangan politik. Mulanya awal kebangkitan pergerakan wanita ini hanya berada di lapisan atas, tetapi kemudian dalam perkembangannya makin meluas ke lapisan bawah. Berkembangnya pergerakan ini juga dengan tujuan yang makin bertambah dan mantap.

Timbulnya pergerakan wanita merupakan realisasi dari cita-cita Kartini yang memperjuangkan perbaikan kedudukan sosial wanita. Pergerakan wanita awal abad ke-20 identik dengan pergerakan pada wilayah sosial dan pendidikan. Mereka lebih banyak bergerak pada perbaikan kedudukan sosial dan peningkatan kecakapan melalui pendidikan maupun keterampilan serta perbaikan dalam hidup keluarga, perkawinan dan mempertinggi kecakapan sebagai seorang ibu (Suhartono, 1994: 102). Urusan politik belum menjadi konsentrasi utama pergerakan wanita awal abad ke-20.

Setelah tahun 1920 organisasi wanita semakin luas orientasinya terutama dalam menjangkau masyarakat bawah dan tujuan politik dilakukan bersama-sama organisasi sosial dan politik pada umumnya. Keterlibatan kaum wanita pada masa pergerakan nasional dimulai dengan keberadaan bagian wanita di organisasi-organisasi induk seperti Puteri Mardika yang merupakan organisasi keputrian di Budi Utomo. Sebagai bagian dari organisasi induk tentu jalan pergerakan wanita harus mengikuti organisasi induk tersebut.

Sesuai dengan tuntutan zaman dan suasana perjuangan politik yang makin meningkat, maka timbul kesadaran nasional kaum wanita. Setelah itu muncul berbagai gerakan wanita lain dan semakin banyak, bahkan mulai muncul berbagai organisasi yang berjuang untuk membela hak-hak wanita seperti hak mereka dalam perkawinan. Adanya perubahan ini tidak saja mendatangkan perbaikan nasib tetapi juga menambah kesanggupan dan kecakapan wanita dalam hal berorganisasi. Berbagai perkumpulan lahir dan berkembang baik yang berdiri

sendiri maupun sebagai bagian dari partai politik atau organisasi lain yang anggotanya terdiri dari kaum lelaki. Perkumpulan-perkumpulan wanita ini yang merupakan pergerakan nasional bagian wanita.

Semakin meningkatnya perjuangan nasional dan timbulnya berbagai perkumpulan atau organisasi, maka berdiri pula perkumpulan-perkumpulan wanita. Demikianlah Partai Sarekat Islam (PSI) mempunyai bagian wanitanya yang bernama Wanita Oetama (kemudian menjadi Sarekat Perempuan Islam Indonesia), Muhammadiyah mempunyai Aisiyah, Jong Islamieten Bond mempunyai Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling (JIBDA), Jong Java mempunyai *Meisjeskring*, Pemuda Indonesia mempunyai Putri Indonesia, dan Taman Siswa dengan Wanita Taman Siswa. Selain perkumpulan diatas, masih terdapat beberapa perkumpulan wanita lainnya seperti Wanita Katholik (Yogyakarta), Wanita Moeljo (Yogyakarta) dan Nahdlatoeel Fataat (Yogyakarta).

Paham kebangsaan dan persatuan Indonesia berkembang dalam beberapa jenis organisasi wanita tersebut, oleh karenanya guna membulatkan tekad dan mendukung persatuan Indonesia diadakan Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta sebagai manifestasi dari kesadaran nasional kaum wanita. Kongres Perempuan Indonesia Pertama ini dilaksanakan pada tanggal 22-25 Desember 1928 yang bertujuan mempersatukan cita-cita dan memajukan wanita Indonesia serta membuat gabungan organisasi wanita.

Kongres tersebut dihadiri kurang lebih 30 perkumpulan wanita. Perkumpulan wanita yang hadir antara lain: Putri Indonesia (Yogyakarta), Wanita Katholik (Yogyakarta), Wanita Moeljo (Yogyakarta), Wanita Utomo (Yogyakarta), Roekoen Wanidijo (Jakarta), Budi Rini (Malang), Putri Indonesia (Surabaya), Wanita Sedjati (Bandung), Putri Budi Sedjadi (Surabaya), Kesoemo Rini (Kudus), Aisiyah (Solo), Wanita Taman Siswa (Yogyakarta) dan sebagainya. Kongres ini dihadiri pula oleh perkumpulan laki-laki antara lain dari Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Sarekat Islam (PSI), Pemuda Indonesia (PI), Muhammadiyah dan sebagainya (Poeponegoro & Notosusanto, 2009: 219). Kongres Perempuan Indonesia yang pertama ini dipimpin oleh R.A. Soekonto sebagai ketua, St. Mundjiah sebagai wakil ketua, Siti Sukaptinah

sebagai sekretaris I, Sunaryati sebagai sekretaris II dan R.A Harjodiningrat sebagai bendahara. Tujuan dari diadakannya Kongres Perempuan Indonesia Pertama ialah untuk mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia. Kongres ini berhasil memutuskan untuk mendirikan gabungan atau federasi perkumpulan wanita dengan nama Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) dan yang berkedudukan di Yogyakarta. Hasil lain dari adanya Kongres ini yakni diputuskan pula hendak mendirikan *studiefonds* untuk anak-anak putri yang pandai tetapi tidak mampu, memberantas perkawinan anak-anak dan memajukan kependuan untuk anak-anak putri. Kesuksesan Kongres Perempuan Indonesia Pertama memiliki makna khusus terhadap emansipasi wanita Indonesia, yang kemudian Kongres tersebut diselenggarakan sebanyak empat kali. Kongres Perempuan mengangkat isu-isu wanita yang hangat ada masa itu dengan tujuan mengangkat derajat wanita.

Penulis memilih judul **“Peranan Kongres Perempuan Indonesia pada Masa Pergerakan Nasional Tahun 1928-1941”** karena penulis memiliki ketertarikan terhadap pergerakan kaum wanita pada masa tersebut. Keputusan penulis untuk membahas peranan Kongres Perempuan Indonesia bertujuan untuk menggeser dominasi penulisan sejarah politik yang androcentris (berpusat pada peran laki-laki) menuju rekonstruksi sejarah yang androgynous (melibatkan laki-laki maupun wanita) khususnya dalam gerakan politik masa pergerakan nasional (Kuntowijoyo, 2003: 128). Alasan peneliti mengambil rentang waktu tahun 1928 dikarenakan tahun tersebut merupakan tonggak sejarah yang penting bagi kaum wanita karena saat itu dimulailah kesatuan pergerakan wanita Indonesia.

1.2 Penegasan Judul

Penegasan pengertian judul dimaksudkan untuk lebih memperjelas serta menghindari terjadinya salah pengertian dan kesalahan persepsi terhadap kata-kata atau istilah yang terdapat dalam judul **“Peranan Kongres Perempuan Indonesia pada Masa Pergerakan Nasional tahun 1928-1941”**, serta untuk mendapat gambaran yang jelas dan penafsiran yang sama antara penulis dan pembaca.

Pengertian peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Melly G.Tan (dalam Koentjaraningrat, 1997: 22) menjelaskan bahwa peranan adalah sesuatu yang dihubungkan dengan perilaku seseorang dalam kedudukan tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas, maksud yang terkandung dalam judul “Peranan Kongres Perempuan Indonesia pada Masa Pergerakan Nasional dalam Memperjuangkan Emansipasi Wanita tahun 1928-1941” adalah usaha atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi wanita pada masa pergerakan nasional dalam memperjuangkan kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekanan hukum yang membatasi untuk berkembang dan maju dalam Kongres Perempuan Indonesia.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penentuan ruang lingkup penelitian sangat penting bagi peneliti dengan maksud untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas, maka perlu dibatasi ruang lingkupnya agar permasalahan terfokus pada permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi waktu (temporal), tempat (spasial).

Ruang lingkup waktu (temporal) penelitian ini adalah dimulai pada tahun 1928 sampai tahun 1941. Kongres Perempuan Indonesia pertama kali dilaksanakan oleh organisasi-organisasi perempuan pada masa pergerakan nasional dalam memperjuangkan kaum perempuan tahun 1928 dan tahun 1941 sebagai akhir diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia. dalam kurun waktu tersebut, Kongres Perempuan Indonesia diselenggarakan sebanyak empat kali.

Ruang lingkup tempat (spasial) peneliti memfokuskan peristiwa yang terjadi di Indonesia khususnya di Jawa mengingat Jawa sebagai pusat tempat terjadinya Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia pertama diselenggarakan di Yogyakarta. Kongres Perempuan Indonesia kedua diselenggarakan di Jakarta, Kongres Perempuan ketiga diselenggarakan di

Bandung dan Kongres Perempuan Indonesia keempat diselenggarakan di Semarang.

1.4 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) bagaimanakah pergerakan wanita pada masa pergerakan nasional Indonesia?
- 2) bagaimanakah peranan Kongres Perempuan Indonesia masa pergerakan nasional tahun 1928-1941?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) untuk menganalisis pergerakan wanita pada masa pergerakan nasional Indonesia,
- 2) untuk menganalisis peranan Kongres Perempuan Indonesia masa pergerakan nasional tahun 1928-1941.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan diatas, maka penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut.

- 1) bagi penulis, penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan sejarah mengenai peranan Kongres Perempuan Indonesia ,
- 2) bagi mahasiswa calon guru sejarah dapat mengetahui dengan jelas mengenai peranan Kongres Perempuan Indonesia pada masa pergerakan nasional
- 3) bagi almamater, merupakan salah satu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma penelitian
- 4) bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai peranan Kongres Perempuan Indonesia pada masa pergerakan nasional.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian serta pendekatan dan teori yang digunakan dalam penelitian. Menurut Abdurrahman (2007:61) dalam bukunya penelitian sejarah mengatakan bahwa untuk penelitian sejarah, berarti perlu ditemukan sejarah penulisan (historiografi) dalam bidang yang akan diteliti dan seluruh penelitian akan di *review*. Hasil-hasil penelitian terdahulu maupun buku yang terkait dengan **“Peranan Kongres Perempuan Indonesia pada Masa Pergerakan Nasional Tahun 1928-1941”** yang penulis dapatkan, baik yang telah diterbitkan dalam bentuk buku maupun dalam bentuk skripsi.

Pendekatan sejarah menjelaskan dari segi mana kajian sejarah akan dilakukan, dimensi mana yang akan diperhatikan, unsur-unsur mana yang akan diungkapkan dan sebagainya. Penjelasan yang diperoleh akan banyak ditentukan oleh pendekatan yang dilakukan. Pendekatan dalam penulisan sejarah untuk mempermudah pengkajian suatu masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis.

Menurut Soekanto, S (2007: 18) sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses social, termasuk perubahan-perubahan social. Sosiologi adalah suatu ilmu yang objeknya adalah masyarakat. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk mengungkap unsur sosial, jaringan interaksi, struktur organisasi, pola kelakuan dan sistem sosial.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat interaksi dalam masyarakat serta konflik-konflik yang muncul dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat lebih dalam sistem sosial yang berlaku dan melingkupi ruang gerak wanita masa itu. Pendekatan sosiologis dapat membantu menganalisa peranan wanita dalam Kongres Perempuan Indonesia pada masa pergerakan sesuai kondisi sosial masyarakat masa itu.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori feminisme liberal. Teori Feminisme liberal yang sebagaimana diungkapkan oleh Kristeva (2012: 157)

dalam bukunya yang berjudul “*Manifesto Wacana Kiri*” adalah salah satu bentuk feminisme yang mengusung adanya persamaan hak untuk perempuan dapat diterima melalui cara yang sah dan perbaikan-perbaikan dalam bidang sosial dan berpandangan bahwa penerapan hak-hak wanita akan dapat terealisasi jika perempuan disejajarkan dengan laki-laki. Feminisme liberal mengusahakan untuk menyadarkan wanita bahwa mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan wanita di sektor domestik dikampanyekan sebagai hal yang tidak produktif dan menempatkan wanita pada posisi sub-ordinat. Budaya masyarakat Amerika yang materialistis, mengukur segala sesuatu dari materi, dan individualis sangat mendukung keberhasilan feminisme. Wanita-wanita tergiring keluar rumah, berkarier dengan bebas dan tidak tergantung lagi pada pria.

Buku-buku dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain buku karangan Blackburn, Susan (2007: 158) yang berjudul yang berjudul “*Kongres Perempuan Indonesia Pertama: Tinjauan Ulang*”. Buku ini merupakan terbitan dari fotokopi majalah Isteri edisi Kongres Perempuan Indonesia Pertama yang memuat rekam proses berlangsungnya Kongres Perempuan Indonesia Pertama. Kongres ini memuat serangkaian acara serta memiliki usulan-usulan para wanita mengenai kongres, notulensi jalannya kongres dan teks-teks pidato yang disampaikan tokoh pergerakan wanita saat itu seperti kesetaraan gender dan pemahaman cara pandang kaum perempuan tentang norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

Buku karangan Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita (1958: 19) yang berjudul “*Buku Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, 22 Desember 1928-22 Desember 1958*”. Buku ini berisi rangkaian acara, pidato-pidato yang dibacakan sampai proses yang ada selama berlangsungnya acara Kongres ini. Tujuan adanya Kongres ini supaya menjadi pertalian antara perkumpulan-perkumpulan wanita Indonesia dan dapat bersama-sama membicarakan soal-soal kewajiban, kebutuhan dan kemajuan wanita.

Buku “*Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*” karya Ridjal, Fauzie (1993: 18) memuat tentang beberapa artikel yang membahas mengenai perkembangan Kongres Perempuan Indonesia. Beberapa artikel dalam buku

membahas tentang Kongres Perempuan Indonesia Kedua sampai pada Kongres Perempuan Indonesia Keempat.

Sri Ana Handayani (1989: 16) dalam laporan penelitiannya yang berjudul “*Sumbangsih Wanita dalam Masa Pergerakan Nasional Indonesia*”. laporan ini menjelaskan mengenai pandangan budaya masyarakat terhadap kedudukan wanita serta pertumbuhan dan perkembangan organisasi wanita. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu digambarkan masih terbelenggu oleh kebodohan tidak dapat lepas dari budaya masyarakat yang sudah terbentuk khususnya mengenai pandangan masyarakat terhadap kedudukan wanita. Kedudukan wanita jauh lebih buruk dibandingkan dengan kaum pria karena pandangan masyarakat belum menempatkan wanita pada kedudukan yang sederajat dengan kaum pria, sehingga status sosialnya lebih rendah dalam kehidupan masyarakat sendiri. Kaum wanita hanya sebagai warga *second sex* semata yang memiliki fungsi sebagai alat reproduksi, konco wingking dan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan dibelakang rumah. Kedudukan wanita seiring waktu mengalami perubahan semenjak dibukanya sekolah-sekolah yang mencetak kaum intelektual yang mengubah pandangan masyarakat akan peran wanita dalam kehidupan berbangsa. Bahkan wanita memainkan perannya dalam kehidupan berbangsa dengan mendirikan organisasi-organisasi wanita. Meskipun pada awalnya organisasi-organisasi wanita ini hanya berkecimpung dibidang sosial budaya, akhirnya organisasi wanita ini juga merambah ke dunia sosial politik dengan diselenggarakannya Kongres Perempuan.

Pringgodigdo (1994: 195) dalam bukunya “*Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*” mengemukakan tentang periode pergerakan wanita. Periode pergerakan wanita Indonesia dibagi menjadi tiga babak. Babak pertama pergerakan wanita sebelum tahun 1920. Fase perjuangan wanita pada masa ini melalui pemikiran-pemikiran. Hal itu dimulai sejak emansipasi yang dilakukan kartini. Pergerakan wanita pada masa ini pada wilayah sosial dan pendidikan. Mereka lebih banyak bergerak dibidang perbaikan kedudukan sosial dan peningkatan kecakapan melalui pendidikan maupun keterampilan. Babak kedua pergerakan wanita tahun 1920-1930. Setelah tahun 1920 organisasi wanita

semakin luas orientasinya terutama dalam menjangkau masyarakat bawah dan tujuan politik dilakukan bersama-sama organisasi sosial dan politik pada umumnya. Keterlibatan kaum wanita dimulai dengan keberadaan bagian wanita di organisasi-organisasi induk seperti Puteri Mardika yang merupakan organisasi keputrian di Budi Utomo.

Babak ketiga yaitu pergerakan wanita sesudah tahun 1930. Pada masa ini kaum wanita mengubah taktik perjuangannya, yaitu dengan cara ikut mendukung aksi kaum pergerakan nasional. Gerakan wanita pada masa ini tidak hanya menjadi bagian wanita dari organisasi pergerakan, tetapi sudah terdapat organisasi wanita yang berdiri sendiri secara mandiri seperti, Istri Sedar, Istri Indonesia dan Putri Budi Sedjati. Gerakan wanita sudah mulai memperkaya ruang gerak organisasi wanita termasuk keterlibatan dalam wilayah politik.

Santosa A. B. (2008 : 14) dalam diktatnya "*Sejarah Pergerakan Nasional (dari Budi Utomo 1908 hingga Poklamasi Kemerdekaan 1945*" memaparkan tentang emansipasi wanita dan nasionalisme. Awalnya keadaan perempuan Indonesia pada masa kolonialisme Belanda masih ada dalam konservatisme dan sangat terikat oleh adat. Pendidikan hanya diperuntukkan oleh kaum laki-laki. R.A. Kartini pelopor gerakan emansipasi menularkan pemikiran atau gagasan tentang perlunya pendidikan bagi kaum perempuan. Dalam waktu singkat pemikiran atau gagasan Kartini terealisasikan. Banyak sekolah-sekolah putri didirikan salah satunya sekolah Kartini di Semarang atas dorongan Van Deventer. Dengan diperolehnya pendidikan, konservatisme dan ikatan adat dapat ditembus dan perempuan Indonesia sudah dapat kebebasan yang dikehendakinya melalui organisasi wanita yang memperjuangkan kemajuan dan emansipasi perempuan. Selanjutnya organisasi tersebut merambah aktivitasnya di politik dengan menebarkan nasionalisme.

Kartodirjo (1999: 102) dalam bukunya "*Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*" mengemukakan masalah nasionalisme dan pergerakan nasional yang mengacu pada organisasi-organisasi menuju ke arah persatuan bangsa. Pembahasan dalam buku ini dibagi menjadi tiga bagian, yang pertam tentang masalah politik kolonial

Belanda, bagian kedua tentang sejarah pergerakan nasional mulai dari perkembangan kehidupan masyarakat sampai pada krisis dunia dan politik kolonial, dan yang ketiga menjelaskan tentang sejarah analitik struktural nasionalisme Indonesia. penulis memperoleh informasi sekitar pergerakan nasional yang dipaparkan dalam buku ini. keadaan Indonesia yang kacau akibat dari pemerintahan kolonial Belanda. Melihat keadaan itu, rakyat Indonesia berusaha keras untuk mencapai pembebasan kebangsaannya. Usahnya dilakukan dengan cara mendirikan organisasi-organisasi kebangsaan. Buku ini memberi gambaran tentang bagaimana pergerakan rakyat Indonesiamelawan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1908-1942. Wujud dari gerakan tersebut meliputi gerakan politik, gerakan sarekat pekerja, gerakan keagamaan, gerakan wanita, dan gerakan pemuda hingga pada keinginan-keinginan berakhiryapemerintahan Belanda. Dari buku ini penulis mendapat gambaran tentang keadaan dan perkembangan organisasi-organisasi dalam gerakan wanita.

Suhartono (1994: 99) dalam bukunya "*Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*" menyatakan bahwa sejak awal berdirinya organisasi pergerakan nasional yang pertama sudah terpikirkan adanya regenerasi pimpinan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Timbulnya organisasi timbulnya organisasi perempuan menunjukkan kaderisasi pimpinan yang nantinya menjadi pemimpin organisasi selanjutnya. Organisasi perempuan ini mengikuti jejak organisasi politik yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. buku ini memaparkan perkembangan sejarah pergerakan nasional secara sistematis mulai dari keadaan politik kolonial Belanda, organisasi-organisasi awal pergerakan nasional, organisasi agama, organisasi pemuda dan wanita, serta pada masa fasisme Jepang sampai Proklamasi. Dalam buku ini dijelaskan secara detail mengenai pergerakan pada masa itu agar dapat menempatkan peristiwa-peristiwa secara urutan waktu yang benar.

Skripsi yang berjudul "*Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia Pertama Tahun 1928 di Yogyakarta*" yang disusun oleh Winingsari Trimurti (2015:57), Universitas Negeri Yogyakarta memberikan ulasan lengkap tentang pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia I beserta pidato-pidato yang

dikemukakan di dalam kongres pada dasarnya mengenai kemajuan wanita yang akhirnya mengarah pada kerjasama atau perjuangan bersama kaum laki-laki untuk mencapai persatuan bangsa. Hak-hak perkawinan dibicarakan dalam sejumlah pidato oleh wanita anggota organisasi yang tidak berlandaskan agama. Kebanyakan dari pembicara menekankan pentingnya pendidikan modern bagi gadis muda. Para pembicaranya mengangkat gagasan dan gayanya sendiri dengan sangat terbuka, mereka menampakkan suka cita dengan kebhinekaan mereka.

Senada dengan hal itu Indah Firdaningsih (2009:21) dalam skripsinya yang berjudul "*Kongres Perempuan Indonesia II, 20-24 Juli 1935*" mengemukakan tentang perjuangan kaum perempuan dalam usahanya memperbaiki nasib perempuan dilaksanakanlah Kongres Perempuan Indonesia kedua. Hal-hal yang selalu mendapat perhatian dari kongres tersebut adalah mengenai masalah : 1. Kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan, 2. Perlindungan perempuan dan anak-anak dalam perkawinan, 3. Mencegah perkawinan anak-anak, 4. Pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Kedua skripsi diatas hanya menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kongres Perempuan Indonesia yang menjadi topik penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan mengungkap peranan Kongres Perempuan Indonesia mulai yang pertama tahun 1928 hingga yang keempat tahun 1941. Selain itu, peneliti menganalisis peranan Kongres Perempuan Indonesia dari isu-isu yang dibahas dari kongres tersebut

BAB 3. METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dikarenakan data-data yang dipergunakan ialah data-data sejarah mengenai kedudukan dan peran perempuan pada masa pergerakan nasional. Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1986: 32). Menurut Nazir (2003: 48) metode penelitian sejarah adalah sebagai penyelidikan yang kritis dan hati-hati terhadap pengadaan dan pengalaman masa lampau serta pengembangan dan menimbang cukup teliti keterangan yang diperoleh sekaligus diinterpretasikan. Sedangkan menurut Nawawi metode penelitian sejarah adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan baik untuk memahami kejadian serta keadaan yang berlangsung pada masa lalu, baik berkaitan dengan masa sekarang ataupun tidak (1998: 78-79).

Berkaitan mengenai metode penelitian sejarah, metode penelitian ini memiliki langkah-langkah sebagai prosedur penelitiannya. Notosusanto (1971: 17) mengemukakan ada empat langkah dalam penelitian sejarah, langkah-langkah tersebut meliputi heuristik, kritik, intepretasi, dan historiografi.

Langkah pertama yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah heuristik. Heuristik adalah kemampuan menemukan dan menghimpun sumber-sumber yang diperlukan dalam penulisan sejarah (Rochmat, 2009: 147). Dapat disimpulkan heuristik merupakan kegiatan atau langkah awal dari penelitian sejarah yaitu suatu proses mencari dan mengumpulkan bahan-bahan atau sumber sejarah yang akan digunakan dalam penelitian sejarah. Penulis dalam penelitian ini bersifat studi pustaka, maka pada tahap ini penulis mencari sumber tertulis baik berupa artikel, buku, dokumen, dan penelitian terdahulu. Sumber-sumber tersebut didapatkan dari Perpustakaan Pusat Universitas Jember, Referensi Kelamas FKIP-Universitas Jember, Perpustakaan Daerah Kabupaten Jember dan koleksi pribadi dari penulis.

Setelah sumber-sumber berhasil dikumpulkan dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber dasar yang

merupakan bukti atau saksi utama yang terlibat atau melihat peristiwa secara langsung. Sedangkan sumber sekunder yang berupa penelitian-penelitian terdahulu mengenai kejadian atau peristiwa sejarah (Nazir, 2003: 50). Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku yang ditulis oleh para pelaku sejarah atau tokoh yang mengalami, menyaksikan sendiri peristiwa tersebut atau buku-buku yang mengutip dari catatan yang terjadi pada peristiwa tersebut. Sumber primer yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini adalah Kongres Perempuan Indonesia Pertama : Tinjauan Ulang yang disusun oleh Susan Blackburn.

Sumber sekunder sebagai pendukung sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini juga berupa buku yang atau penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber sekunder biasanya ditulis oleh penulis profesional sekalipun tidak terlibat dalam peristiwa tersebut. Sumber sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia yang disusun secara tim oleh Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia oleh Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945 oleh Suhartono dan lain sebagainya.

Langkah selanjutnya setelah melakukan pengumpulan data ialah melakukan kritik atau verifikasi yang bertujuan untuk mengetahui keaslian dari sumber tersebut. Data atau sumber yang berkaitan dengan peranan Kongres Perempuan Indonesia dalam memperjuangkan emansipasi wanita yang telah terkumpul diseleksi dulu dengan cara mengkritik. Peneliti melakukan kritik terhadap sumber untuk mendapatkan fakta-fakta yang benar. Kritik sumber yang dilakukan peneliti haruslah seobyektif mungkin, agar diperoleh data dan sumber yang benar-benar sesuai dengan penelitiannya. Kritik sumber berfungsi untuk mengkaji keabsahan dan kredibilitas sumber yang meliputi kritik ekstern dan kritik intern.

Kritik ekstern dilakukan untuk melihat keaslian sumber dengan melihat dari pengarang buku, pengarang buku perlu dilihat agar mengetahui seberapa jauh keterlibatan pengarang terhadap topik yang dikaji. Selain pengarang buku, peneliti

juga perlu melihat tahun terbit buku. Hal tersebut dilakukan agar peneliti memperoleh data data yang dapat dipertanggung jawabkan.

Selain melakukan kritik ekstern perlu dilakukan kritik intern yaitu dengan melihat dan membandingkan substansi isi buku. Peneliti membandingkan buku buku yang sudah terkumpul dilihat dari isi buku tersebut untuk memperoleh fakta sejarah yang akurat. Data yang sudah diperoleh dipilah-pilah dan dilihat penilaian bentuk luar, penilaian isi, pengarang buku, tujuan penulisan buku tersebut sehingga peneliti mendapatkan fakta sejarah yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah adalah interpretasi yang merupakan penafsiran fakta. Sumber-sumber yang telah melewati kritik ekstern maupun intern kemudian diinterpretasikan. Interpretasi adalah menetapkan fakta-fakta yang telah teruji dan lebih bermakna karena saling berhubungan atau saling menunjang (Rochmat, 2009: 150). Sedangkan menurut Nugroho Notosusanto (1971: 17) interpretasi adalah menetapkan makna dan saling berhubungan antara fakta-fakta yang telah didapat. Jadi interpretasi adalah suatu aktivitas dalam memilih fakta-fakta yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian menghubungkan fakta-fakta tersebut untuk memperoleh gambaran tentang peristiwa sejarah. Dalam penerapannya peneliti merangkai fakta sejarah antara satu dengan yang lain dan disusun secara kronologis suatu peristiwa sehingga diperoleh kisah sejarah yang benar-benar sesuai dengan realita yang kejadiannya. Setelah itu melakukan penafsiran sesuai dengan sumber yang diperoleh dengan aspek pembahasan yaitu peranan Kongres Perempuan Indonesia dalam memperjuangkan emansipasi wanita.

Langkah terakhir yang dilakukan adalah kegiatan penulisan sejarah yang biasa disebut dengan historiografi. Historiografi diartikan sebagai kegiatan merekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh (Gottschalk, 1985: 32). Sedangkan menurut Nugroho Notosusanto adalah penyusunan hasil interpretasi atas fakta-fakta sejarah yang telah disusun secara analisis, kronologis, dan sistematis menjadi suatu kisah yang selaras (1971: 24). Maksud dari uraian di atas ialah historiografi merupakan usaha-usaha untuk

mengkaitkan fakta-fakta sejarah menjadi suatu kisah yang jelas, kemudian menyusun secara kronologis dan sistematis dan dapat diyakini kebenarannya. Penulis menyajikan karya ilmiah ini yang berupa cerita sejarah dalam bentuk skripsi terdiri dari 6 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB. 1 PENDAHULUAN

Bab pertama skripsi ini berisi tentang latar belakang permasalahan, penegasan pengertian judul, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA,

Bab kedua berisi kumpulan kepustakaan yang dipakai sebagai acuan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini beserta pendekatan dan teori yang dipakai peneliti.

BAB 3 METODE PENELITIAN,

Bab ketiga berisi metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

BAB 4 PERGERAKAN WANITA INDONESIA PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL

Bab keempat berisi proses munculnya gerakan wanita masa pergerakan nasional. Pembahasan mengenai timbulnya pergerakan nasional Indonesia dan fase gerakan wanita Indonesia. Fase gerakan wanita dimulai tahun 1908-1920, tahun 1920-1930 dan setelah tahun 1930-1941.

BAB 5 PERANAN KONGRES PEREMPUAN INDONESIA

Bab kelima berisi tentang jalannya Kongres Perempuan Indonesia dan hasil kongres baik dalam kongres Perempuan Indonesia pertama, Kongres Perempuan Indonesia kedua, Kongres Perempuan Indonesia ketiga hingga Kongres Perempuan Indonesia keempat..

BAB 6 PENUTUP

Bab keenam berisi kesimpulan dari pembahasan masalah yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan juga merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada bab pertama. Bab ini juga berisi saran dari

peneliti dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi wanita pada zaman sekarang dengan mengacu kepada hasil penelitian.



BAB 4. PERGERAKAN WANITA MASA PERGERAKAN NASIONAL

4.1 Timbulnya Pergerakan Nasional

Abad ke XIX terjadi perubahan politik dalam pemerintahan kolonial Belanda. Muncul tokoh Van Deventer dengan gagasan Politik Etis (Suhartono, 1994: 16-17). Pemikiran itu didukung oleh kaum demokrat liberal yang pada akhirnya membuat pemerintah harus membentuk lembaga pendidikan. Pemerintah lalu membuka sekolah untuk mendidik calon-calon pekerja yang terlatih dan terampil pada bidang pekerjaan yang diperlukan. Pendidikan itu kecuali memberi latihan praktis pada akhirnya tujuan yang ingin dicapai adalah kesejahteraan demi meningkatkan derajat dan persamaan kedudukan dalam masyarakat.

Awal abad ke XX muncul gerakan baru untuk kemerdekaan Indonesia. Faktor gerakan kemerdekaan muncul dari luar negeri dan dalam negeri. Upaya untuk membebaskan diri dari penjajah sangat sulit jika hanya dengan mengandalkan kekuatan kedaerahan saja. Terjadi banyak kekalahan membuat Indonesia semakin menderita dengan perjanjian yang dibuat untuk melemahkan kekuasaan pribumi. Kekalahan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah disebabkan oleh beberapa faktor, seperti belum adanya persatuan dan kesatuan, sifat perjuangan yang masih kedaerahan hanya mementingkan daerahnya sendiri, belum adanya organisasi nasional dan hanya mengandalkan kekuatan fisik.

Faktor penderitaan dan kesengsaraan akibat penjajahan menimbulkan rasa Nasionalisme pada rakyat Indonesia. Tekanan dan penderitaan mengakibatkan adanya rasa senasib diantara masyarakat Indonesia yang menghendaki menentukan nasib sendiri bebas dari penjajahan. Rasa nasionalisme membuat strategi perlawanan diubah dari kekuatan fisik menjadi kekuatan pikiran (diplomasi). Strategi perlawanan menggunakan pikiran tidak bisa lepas dari peran pemerintah Belanda sendiri yang memberikan kesempatan kepada pribumi untuk sekolah. Kaum pribumi diberi kesempatan belajar disekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda melalui kebijakan Politik Etis.

Hasil dari adanya pendidikan itu adalah timbulnya golongan elit nasional atau kaum terpelajar yang kemudian mendirikan Budi Utomo. Kaum terpelajar ini mulai mempunyai pandangan baru tentang nasionalisme dan wanita. Mereka melihat bahwa pendidikan merupakan alat penting untuk memajukan masyarakat dan salah satu syarat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu adalah meningkatkan derajat wanita (Leiriza *et al*, 1989:123).

Usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan melalui wanita ini telah dirintis oleh Kartini dengan ide-ide yang cemerlang dan Dewi Sartika yang mendirikan sekolah untuk wanita. Jauh sebelum waktu tersebut, telah berdiri beberapa organisasi wanita, baik secara perorangan maupun kelompok terbatas yang semuanya mempunyai tujuan ingin memajukan kerjasama untuk kemajuan wanita khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sementara itu, perubahan-perubahan yang terjadi pada awal abad XX dengan munculnya Budi Utomo tidaklah berarti perubahan terjadi pada kaum pria saja tetapi perbaikan itu juga menyangkut perbaikan kaum wanita, karena bagaimanapun wanita mempunyai peranan yang besar dalam keluarga sebagai istri dan ibu anak-anaknya. Kaum wanita pun bangkit dan mendirikan perkumpulan-perkumpulan wanita.

Tanggal 3 September 1912, Cipto Mangunkusumo mendirikan studieclub dengan nama Kartini di kota Malang. Tidak tanpa alasan Cipto menggunakan nama Kartini sebagai studieclubnya. Cipto Mangunkusumo berpendapat bahwa tujuan Kartini bukan semata-mata untuk menggalang suatu gerakan wanita, tetapi untuk membangkitkan rakyat Indonesia yang tertidur berabad-abad lamanya (Mulyono, 1969:120). Itulah sebabnya maka nama Kartini diperuntukkan sebagai lambang kesadaran nasional dan lambang cita-cita yang mulia. Ia adalah pembangkit kesadaran nasional, oleh karena itu nama Kartini digunakan sebagai nama studieclubnya yang anggotanya bukan hanya wanita saja bahkan sebagian besar adalah pria.

Hakekatnya kesadaran nasional tidaklah identik dengan politik menentang penjajahan. Politik menentang penjajahan hanyalah salah satu manifestasi kesadaran nasional. Pokok terpenting ialah usaha untuk ikut serta memajukan

bangsa (Mulyono, 1969:121). Semangat kebangsaan yang tumbuh dan berkembang ini telah membawa pengaruh yang besar pada kaum wanita pribumi. Sama seperti kaum laki-laki mereka tumbuh kesadarannya akan situasi dan kondisi hidup dalam masyarakat yang terjajah (Poesponegoro & Notosusanto, 2009:411). Mereka menyadari berbagai masalah yang dihadapi oleh orang Indonesia khususnya kaum wanita. Banyak hambatan yang dihadapi oleh kaum wanita untuk dapat menentukan sendiri kehendaknya.

4.2 Periode Pergerakan Wanita Indonesia

4.2.1 pergerakan wanita tahun 1908-1920

Munculnya pergerakan wanita bahkan terjadi sebelum masa pergerakan nasional. Pergerakan wanita dimulai masa penjajahan Belanda dimana banyak tokoh wanita seperti Martha Kristina Tiahahu, Nyi Ageng Serang, Cut Nyak Dien dan Cut Meutia yang berjuang mengangkat senjata melawan Belanda (Kongres Wanita Indonesia, Anonim, 1978:2). Fase perjuangan wanita yang tidak lagi mengangkat senjata tetapi melalui pemikiran dimulai sejak emansipasi yang dilakukan oleh R.A. Kartini.

Pergerakan wanita awal abad XX identik dengan pergerakan pada wilayah sosial dan pendidikan. Mereka lebih banyak bergerak pada perbaikan kedudukan sosial dan peningkatan kecakapan melalui pendidikan maupun keterampilan serta perbaikan dalam hidup keluarga, perkawinan dan mempertinggi kecakapan sebagai seorang ibu (Suhartono, 1994:102). Urusan politik belum menjadi konsentrasi utama pergerakan wanita awal abad XX. Soal-soal politik seperti hak pemilihan sama sekali tidak menjadi perundingan, sebab kaum laki-lakipun tidak mempunyai hak, soal kemerdekaan tanah air sama sekali masih jauh (Pringgodigdo, 1994:22).

Faham tentang budi pekerti, keagamaan dan adat, masih menjadi rintangan terbesar bagi wanita untuk dapat bertindak ke arah lebih jauh. Sebab pertama yang mendorong wanita untuk bergerak ialah faham tentang kedudukan wanita dalam perkawinan dan hidup keluarga (Pringgodigdo, 1994:22). Sebab-sebab tersebut ialah kawin paksaan (wanita banyak yang dikawinkan dengan suami

yang belum pernah dilihatnya, atau sudah pernah dilihat tetapi belum dikenal, dalam segala hal hanya boleh bilang ya saja), poligami (dulu boleh dikatakan biasa saja seorang laki-laki beristri lebih dari seorang dan diam dalam satu rumah pula), kekuasaan tidak terbatas dari kaum laki-laki dalam perkawinan (seorang laki-laki dengan begitu saja sewaktu-waktu boleh menceraikan istrinya, tidak usah mengatakan sebab-sebabnya dan tidak ada beban kewajiban untuk menyokong istri yang diceraikan), adat kebiasaan tetap-tinggal-di-rumah (gadis-gadis sejak mulai menginjak waktu dewasa tidak boleh meninggalkan rumah). Inilah sebab-sebab dalam masa pertama yang menggerakkan wanita dari lapisan atas (Pringgodigdo, 1994:22).

Walau pergerakan wanita pada masa permulaan itu adalah merupakan gerak perorangan dan tidak dalam susunan perkumpulan, namun itu merupakan suatu langkah maju dalam proses pembaharuan. Gerakan orang seorang itu berkembang menjadi organisasi perjuangan wanita yang berkembang sesuai perkembangan masyarakat Indonesia ketika itu (Leiriza *et al*, 1989:124). Seiring dengan itu, diusahakan pula pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak gadis untuk mempertinggi derajat sosial, di samping untuk menambah kecakapan dan ketrampilan sebagai ibu dan sebagai pemegang rumah tangga (Leiriza *et al*, 1989:125).

R.A Kartini menjadi pelopor gerakan wanita saat beliau mulai menulis tentang kehidupan, cita-cita, ide, dan pemikiran yang diungkapkan melalui surat-suratnya. Hal ini mendorong banyak tokoh wanita mulai mengikuti jejak R.A Kartini seperti Dewi Sartika, Maria Walanda Maramis dan Rahmah El Yunussyah yang banyak membantu wanita dalam hal menggapai emansipasi.

Pikiran-pikiran Kartini mengenai kepentingan kaum wanita didukung oleh kaum terpelajar bahkan golongan demokrat dalam pemerintahan Hindia Belanda. Tahun 1912 di Jakarta Puteri Mardika berdiri atas bantuan Budi Utomo. Organisasi ini bertujuan memajukan pengajaran anak-anak wanita dengan jalan memberi penerangan dan sokongan uang, disamping mempertinggi sikap yang merdeka dan tegak dan melepaskan tindak malu-malu yang melewati batas (Leiriza *et al*, 1989:127). Walaupun Putri Mardika tidak berumur panjang,

pengaruhnya cukup besar terhadap kaum wanita pribumi yang berpendidikan (Poesponegoro & Notosusanto, 2009:127). Tahun itu pula atas prakarsa Ny. Van Deventer (penganjur politik etis) Kartini fonds (dana Kartini) didirikan.

Seiring dengan itu berdiri pula badan-badan yang mengadakan sekolah-sekolah Kartini di berbagai tempat. Sekolah Kartini didirikan di Semarang dan Jakarta tahun 1913, Madiun tahun 1914, Malang dan Cirebon tahun 1916, Pekalongan tahun 1917, Surabaya, Rembang dan Indramayu tahun 1918. Sedangkan di Jepara lebih awal telah didirikan Sekolah Kartini yang dipimpin langsung R.A. Kartini dan saudara-saudaranya (Sudiyo, 2002:56).

Setelah berdiri organisasi wanita tersebut, ternyata di daerah-daerah lain juga berdiri organisasi wanita dengan tujuan yang sama. Pada tahun-tahun berikutnya berdiri perkumpulan-perkumpulan wanita seperti Kautaman Istri yang tujuannya mengadakan rumah-rumah sekolah untuk wanita. Kautaman Istri di Tasikmalaya didirikan tahun 1913 dan kemudian diikuti dengan Kautaman Istri di Sumedang dan Cianjur tahun 1916, Ciamis tahun 1917, Cicurug tahun 1918, Kuningan tahun 1922 dan Sukabumi tahun 1926. Tahun 1915 Kautaman Istri juga berdiri di Padang Panjang atas prakarsa lulusan Kautaman Istri di Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat muncul Dewi Sartika sebagai tokoh wanita yang banyak mengikuti jejak Kartini, tidak ketinggalan juga Rohannah Kudus yang pada tanggal 11 Februari 1914 mendirikan Kerajinan Amai Setia (KAS) di kota Gadang, Sumatera Barat (Sudiyo, 2002:55).

Terdapat banyak tempat-tempat dengan perkumpulan-perkumpulan kaum ibu yang memajukan kecakapan wanita yang khusus (memasak, menjahit, merenda, pemeliharaan orang beranak, pemeliharaan anak-anak dsb). Latihan untuk mencapai kecakapan tadi dilakukan bersama antara lain oleh perkumpulan-perkumpulan seperti Pawiyatan Wanito (Magelang 1915), Wanito Susilo (Pemalang 1918), dan Wanito Hadi (Jepara 1915). Perkumpulan ini juga memperkuat pergaulan dan mempererat persaudaraan antara kaum ibu (Pringgodigdo, 1994:22).

Tujuan dari perkumpulan-perkumpulan wanita pada masa itu (1904-1920) adalah perbaikan kedudukan dalam hidup keluarga dan perkawinan, memperluas

kecakapan sebagai ibu dan pemegang rumah tangga dengan jalan menambah lapangan pengajaran, memperbaiki pendidikan dan mempertinggi kecakapan-kecakapan khusus untuk wanita (Leiriza *et al*, 1989:125). Perubahan yang terjadi setelah adanya usaha dari perkumpulan-perkumpulan wanita ini akhirnya tampak juga. Sistem poligami, kawin paksa berlakunya suami yang tidak terbatas dalam perceraian membiarkan bodoh gadis-gadis setelah remaja oleh beberapa sebab mulai berkurang. Perubahan seperti itu bukan saja mendatangkan perbaikan nasib kaum wanita melainkan juga menambah kesanggupan dan kecakapannya bertindak dalam suasana organisasi (Leiriza *et al*, 1989:125).

Melihat keadaan yang semakin baik, banyak kaum wanita dengan sukarela menjadi anggota perkumpulan. Jumlah perkumpulan wanita bertambah banyak dan mereka pun bersedia untuk menjadi bagian wanita dari perkumpulan kaum pria. Hal ini disebabkan karena kemajuan kecakapan yang dicapai, termasuk kecakapan bertindak dalam organisasi dan juga tumbuhnya perkumpulan wanita kecil yang berdiri sendiri (Leiriza *et al*, 1989:128). Saat itu tampak berkembang berbagai corak budaya dalam tubuh perkumpulan wanita.

Pergerakan wanita dalam permulaan adalah gerak orang seorang, sebagai aksi dari beberapa orang wanita sendiri-sendiri, tidak dalam susunan perkumpulan. Corak pergerakan wanita dalam masa pertama ini bisa disebut sebagai pergerakan perbaikan kedudukan dalam hidup keluarga dan perkawinan, dan memperluas kecakapan sebagai ibu dan pemegang rumah tangga dengan jalan menambah lapangan pengajaran, memperbaiki pendidikan dan mempertinggi kecakapan-kecakapan wanita yang khusus. Gerak kemajuan ini dilakukan dengan pelan-pelan dan tidak pernah menyerang, wanita dari masa pertama ini umumnya tidak menentang agama Islam atau kaum laki-laki atau pemerintah jajahan (Pringgogido, 1994:24).

Perkumpulan-perkumpulan wanita Indonesia semula juga bersifat apolitis maksudnya tidak ikut mencampuri urusan politik. Sifatnya sosial ekonomis (Pringgogido, 1994:121). Aliran politik yang dianutnya dengan sendirinya sama dengan aliran politik perkumpulan induknya. Seiring waktu sifat sosial ekonomis itu lambat laun hilang, setelah perkumpulan wanita itu menjadi bagian dari

gerakan nasional (Pringgodigdo, 1994:122). Semula para anggota perkumpulan itu berkumpul untuk merundingkan soal-soal yang bersifat sosial. Sejak timbulnya gagasan pembentukan barisan kulit berwarna untuk dihadapkan kepada pemerintah kolonial, maka sifat perkumpulan wanita itu berubah. Perkumpulan wanita terbawa arus politik (Pringgodigdo, 1994:122).

Sejak tahun 1917 mulai berdiri organisasi politik dan tidak ketinggalan pula wanita ikut terjun dalam perjuangan menuju cita-cita Indonesia Merdeka. Oleh karena itu banyak berdiri organisasi wanita yang mengarah ke perjuangan di bidang politik, seperti Sarekat Siti Fatimah di Garut berdiri tahun 1918 yang merupakan bagian dari SI. Tidak kalah pentingnya dan perlu dicatat yaitu pada tanggal 22 April 1917 Muhammadiyah mendirikan Aisyah di Yogyakarta dan 8 Juli 1917 didirikan PIKAT (Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnnya) oleh Maria Walanda Maramis di Manado (Sudiyo, 2002:55). Pergerakan wanita tersebut masih bergerak dibidang sosial-budaya dan sosial-religius.

4.2.2 pergerakan wanita tahun 1920-1930

Pergerakan wanita antara tahun 1920-1927 mulai tegas bahkan ada yang ingin melangkah ke arah pergerakan politik. Setelah tahun 1920 organisasi wanita semakin luas orientasinya terutama dalam menjangkau masyarakat bawah dan tujuan politik dilakukan bersama-sama organisasi sosial dan politik pada umumnya. Keterlibatan kaum wanita pada masa pergerakan nasional dimulai dengan keberadaan bagian wanita di organisasi-organisasi induk seperti Puteri Mardika yang merupakan organisasi keputrian di Budi Utomo. Sebagai bagian dari organisasi induk tentu jalan pergerakan wanita harus mengikuti organisasi induk tersebut.

Sementara itu beberapa organisasi wanita dapat kita lihat mempunyai corak yang lain dari sekedar perkumpulan wanita. Organisasi tersebut adalah bagian wanita dari perkumpulan kaum pria yang telah terbentuk sebelumnya. Organisasi ini ada yang berhaluan politik tetapi ada juga yang tidak mencampuri urusan politik seperti induk perkumpulannya (Leiriza *et al*, 1989:128).

Perkumpulan wanita yang menjadi bagian dari suatu perkumpulan induk mengemban tugas bahwa wanita sebagai pusat keluarga di rumah dan sebagai pendidik anak-anak turunannya adalah suatu faktor yang berharga sekali untuk penyebar cita-cita. Bagian wanita ini dalam penyebaran cita-cita perkumpulan induknya tentu saja lebih menekankan pada mempertinggi hal-hal yang khusus mengenai kewanitaan (Leiriza *et al*, 1989:129).

Sesuai dengan tuntutan zaman dan suasana perjuangan politik yang makin meningkat, maka timbul kesadaran nasional kaum wanita. Setelah itu muncul berbagai gerakan wanita lain dan semakin banyak, bahkan mulai muncul berbagai organisasi yang berjuang untuk membela hak-hak wanita terutama dalam hak berpolitik. Adanya perubahan ini tidak saja mendatangkan perbaikan nasib tetapi juga menambah kesanggupan dan kecakapan wanita dalam hal berorganisasi. Berbagai perkumpulan lahir dan berkembang baik yang berdiri sendiri maupun sebagai bagian dari partai politik atau organisasi lain yang anggotanya terdiri dari kaum lelaki. Perkumpulan-perkumpulan wanita ini yang merupakan pergerakan nasional.

Setelah tahun 1920 memang dapat dilihat bahwa keadaan lekas berubah baik poligami, kawin paksaan, berlakunya kekuasaan suami yang tidak terbatas terhadap perceraian, membiarkan bodoh gadis-gadis akibat larangan menyekolahkan setelah mulai dewasa, perkawinan anak-anak dan sebagainya, di lapisan atas dari masyarakat oleh beberapa sebab telah mulai berkurang. Sebabnya antara lain ialah perluasan jumlah sekolah, makin perlunya gadis-gadis diberikan kesempatan untuk menuntut pelajaran (agar tetap mudah kemungkinan mencari suami) karena anak laki-laki dapat pelajaran lebih baik, hilangnya faham-faham sempit tentang anak wanita bersekolah. Makin luasnya pendirian adalah juga akibat propaganda oleh beberapa organisasi kaum laki-laki yang juga menyetujui perluasan pengajaran anak wanita (diantaranya Budi Utomo) (Pringgodigdo, 1994:110).

Jika pergerakan wanita hanya ditentukan untuk lapisan atas saja dengan tujuan yang sama, maka sesudah beberapa puluh tahun tidak perlu lagi (keadaan kemasyarakatan lapisan atas tentu telah berubah dan berbeda, sehingga apa yang

dahulu barang biasa dalam kalangan itu sesudah 15-20 tahun telah menjadi kecuai) tetapi pergerakan wanita mengenai dan menuju ke semua lapisan rakyat dan tujuannya bertambah (Pringgodigdo, 1994:110).

Perubahan keadaan menjadi baik seperti tersebut diatas, bukan saja mendatangkan perbaikan nasib wanita di golongan-golongan atapun menambah kesanggupan dan kecakapannya bertindak dalam suasana organisasi, oleh karena itu jumlah perkumpulan wanita bertambah dan kaum wanitapun juga lebih bersedia dan cakap untuk menjadi bagian wanita dari perkumpulan-perkumpulan. Sebab kesempatan belajar makin berkembang ke lapisan masyarakat bawah, maka wanita-wanita yang sanggup beraksipun juga menunjukkan perluasan ke lapisan masyarakat bawah pula.

Perkumpulan wanita yang didirikan tahun 1920-1930 dapat dibagi menjadi:

1. Perkumpulan yang menjadi bagian wanita dari partai politik atau perkumpulan pergerakan yang sudah ada misalnya: bagian wanita dari SI yakni Wanudiyo Utomo yang kemudian menjadi Sarekat Perempuan Islam Indonesia, dari Muhammadiyah yakni Aisyiyah.

2. Perkumpulan dari wanita terpelajar yang bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan dan kepandaian puteri yang khusus, misalnya Wanito Utomo di Yogyakarta, Wanito Mulyo, Putri Budi Sejati dan sebagainya.

3. Organisasi pemuda terpelajar yang merupakan bagian dari perkumpulan pemuda yang sudah berdiri misalnya Taman Siswa bagian Wanita, Putri Indonesia bagian dari Pemuda Indonesia, dan Jong Java bagian gadis (Meisjeskring) (Suwondo, 1978:102).

Ketiga jenis perkumpulan (militer, sosial, pemuda terpelajar) walau memiliki sedikit perbedaan corak budayanya namun semuanya dapat bekerja sama. Sampai tahun 1926 hampir semua organisasi wanita itu dapat menerima faham Indonesia bersatu dan kemudian bersama-sama menyetujui anjuran dan panggilan kebangsaan (Suwondo, 1978:102).

Sesudah tahun 1920 kita dapat melihat jumlah perkumpulan wanita bertambah banyak sekali, sedang Partai Komunis Indonesia (PKI), Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah dan Sarekat Ambon mempunyai bagian wanita.

Perkumpulan-perkumpulan ini mengerti, bahwa wanita sebagai pusat keluarga rumah (yaitu bentuk golongan sosial yang terkecil) dan sebagai pendidik turunan adalah suatu faktor yang berharga sekali untuk penyebar cita-cita (Suwondo, 1978:111). Bagian wanita tadi dalam penyebaran cita-cita tentu saja dengan sendirinya mempertinggi hal-hal yang khusus mengenai kewanitaan.

Kongres PKI di Jakarta 7-10 Juni 1924 menyediakan satu hari untuk gerakan wanita komunis dimana pada hari itu orang wanita komunis membicarakan kewajiban kaum wanita dalam perjuangan menentang kaum modal (Suwondo, 1978:102). Bagian SI wanita adalah Wanudijo Utomo kemudian Sarekat Perempuan Islam Indonesia. Bagian wanita Muhammadiyah adalah Aisyah yang juga tidak mencampuri politik seperti Muhammadiyah. Perkumpulan ini dalam tahun 1929 telah mempunyai 5000an anggota tersebar dalam 47 cabang dan 50 kring dan mempunyai 32 rumah sekolah wanita dengan 75 guru puteri (Suwondo, 1978:102). Wanodyo Utomo berdiri di Yogyakarta tahun 1920 yang akhirnya menjadi Sarekat Putri Islam tahun 1925. Pada tahun 1920 berdiri Gorontalosse Mohammedaansche Vrouwen Vereening di Gorontalo dan Serikat Kaum Ibu Sumatra di Bukit Tinggi (Marwati *et al*, 2009:127) serta Nahdatul Fa'at sebagai bagian dari Wal Fadji (Sudiyo, 2002:55).

Bagian wanita Sarekat Ambon, Ina Tuni, membantu aksi Sarekat Ambon di kalangan orang militer Ambon, bagian wanita ini berhaluan politik seperti Sarekat Ambon juga. Telah disebutkan diatas bahwa oleh karena kemajuan kecakapan bertindak dalam susunan organisasi, lain daripada bagian wanita tersebut, pun juga jumlah perkumpulan wanita kecil-kecil yang berdiri sendiri sesudah 1920 sangat bertambah. Hampir disemua tempat yang agak penting ada perkumpulan wanita, di kota yang besar tiap-tiap bagian kota yang didiami banyak pegawai negeri terdapat perkumpulan kaum ibu (Pringgodigdo, 1994:110).

Perkumpulan-perkumpulan ini seperti yang ada sebelum 1920 adalah perkumpulan-perkumpulan penghibur dengan kesempatan untuk belajar kepandaian-kepandaian putri yang khusus. Hanya dimana terdapat wanita yang agak terpelajar, perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai tujuan yang nyata, diantaranya Wanito Utomo, Wanita Muljo, Wanita Katolik yang semuanya

berdiri di Yogyakarta kira-kira tahun 1920 dan sebagainya (Pringgodigdo, 1994:110).

Jenis perhimpunan wanita yang ketiga adalah organisasi-organisasi pemuda-pemudi terpelajar, seperti Puteri Indonesia, JIBDA, Jong Java bagian wanita, organisasi wanita Taman Siswa. Dengan sendirinya dalam perkumpulan pemuda-pemuda inilah yang terutama dapat diterima faham Indonesia Bersatu yang dihidupkan oleh Pemuda Indonesia (PI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI) tetapi juga dalam perkumpulan kaum ibu (jenis ke 2) dan dalam bagian wanita pergerakan laki-laki (jenis 1) anjuran dan panggilan kebangsaan mendapat persetujuan.

Kemudian menjelang Sumpah Pemuda yaitu tahun 1928 berdiri organisasi-organisasi Perempuan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) dan DHE (Dameskransje Help Elkander) di Jakarta. Untuk DHE ini terus berubah nama menjadi Organisasi Sahati (Sudiyo, 2002:57). Sejalan dengan pergerakan pemuda maka setelah Kongres Pemuda II juga diadakan Kongres Perempuan Indonesia Pertama (KPI I).

4.2.3 pergerakan wanita tahun 1930-1941

Antara tahun 1929-1933 kaum wanita mengubah taktik perjuangannya, yaitu dengan cara ikut mendukung aksi kaum pergerakan nasional baik yang dilancarkan dalam Mosi Soetardjo tahun 1936 maupun Tuntutan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) tahun 1939 tentang Indonesia Berparlemen (Sudiyo, 2002:57).

Gerakan wanita pada masa ini tidak hanya menjadi bagian wanita dari organisasi pergerakan, tetapi sudah terdapat organisasi wanita yang berdiri sendiri secara mandiri seperti Istri Sedar, Istri Indonesia dan Putri Budi Sedjati. Gerakan wanita juga sudah mulai memperkaya wilayah gerak organisasi wanita termasuk keterlibatan dalam wilayah politik sebagaimana dilakukan oleh Istri Sedar. Berdirinya Istri Sedar bersamaan dengan tindakan represif pemerintah atas radikalisme organisasi pergerakan yang berhaluan nonkooperatif (Pringgodigdo, 1994:196).

Tidak adanya perkumpulan wanita yang sealiran, puteri-puteri muda dibawah pimpinan Nona Suwarni Djojoseputro tanggal 22 Maret 1930 di Bandung mendirikan Istri Sedar. Istri Sedar keluar dari kongres akibat perdebatan sengit dengan Persatuan Muslim Indonesia (PERMI) bagian wanita mengenai undang-undang perkawinan. Istri Sedar benar-benar menuntut emansipasi sepenuhnya bagi kaum wanita (Mulyono, 1969:124).

Perkumpulan ini menuju pada kesadaran wanita Indonesia dan derajat hidup Indonesia, untuk melekaskan dan menyempurnakan Indonesia Merdeka. Istri Sedar berdiri netral terhadap agama apapun dan dibangun untuk kaum wanita terpelajar dan dari rakyat jelata bersama-sama sebagai organisasi yang tidak akan terjun dalam lapangan politik langsung (Pringgodigdo, 1994:196).

Sementara itu terdorong oleh keinginan untuk mempersatukan organisasi-organisasi yang sama atau hampir sama agar terbentuk tenaga yang lebih kuat maka beberapa perkumpulan wanita kecil-kecil yang semuanya tidak berdasar agama dalam bulan Juni 1932 menggabungkan diri dalam satu organisasi dengan nama Istri Indonesia. Istri Indonesia bertujuan mencapai Indonesia Raya. Asasnya nasionalisme dan demokrasi (Mulyono, 1969:124).

Demikianlah ternyata kesadaran politik sudah tumbuh dalam hati nurani wanita. Kaum wanita ternyata tidak mau ketinggalan dalam gerakan nasional. Diantara perkumpulan wanita tersebut tetap ada yang bergerak di bidang sosial seperti Aisyah dan Pasundan Istri.

BAB 6. PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Timbulnya pergerakan nasional dimulai abad ke XIX dengan diberlakukannya Politik Etis yang merupakan ide dari Van Deventer yakni irigasi, edukasi dan transmigrasi. Hasil dari adanya pendidikan ini adalah timbulnya golongan elit nasional atau kaum terpelajar yang kemudian bersama-sama mendirikan Budi Utomo. Awal abad ke XX muncul gerakan baru untuk kemerdekaan Indonesia. Kaum terpelajar ini mulai mempunyai pandangan baru tentang nasionalisme dan wanita. Usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan wanita telah dirintis oleh Kartini dengan ide-ide yang cemerlang. Perubahan-perubahan yang terjadi pada awal abad XX dengan munculnya Budi Utomo turut serta membawa perbaikan bagi kaum wanita.

Periode pergerakan wanita terjadi dalam tiga periode yakni pergerakan wanita sebelum tahun 1920, pergerakan wanita tahun 1920-1930 dan pergerakan wanita setelah tahun 1930. Pergerakan wanita sebenarnya bahkan terjadi sebelum masa pergerakan nasional. Pergerakan wanita dimulai masa penjajahan Belanda sampai pada saat ini. Pergerakan wanita sebelum tahun 1920/awal abad XX identik dengan pergerakan dalam bidang sosial dan pendidikan. Mereka lebih banyak bergerak pada perbaikan kedudukan sosial dan peningkatan kecakapan melalui pendidikan maupun keterampilan serta perbaikan dalam hidup keluarga, perkawinan dan mempertinggi kecakapan sebagai seorang ibu. Walau pergerakan wanita pada masa permulaan itu adalah gerak perorangan dan tidak dalam susunan perkumpulan, namun itu merupakan suatu langkah maju dalam proses pembaharuan. Pergerakan wanita antara tahun 1920-1927 mulai tegas bahkan ada yang melangkah kearah pergerakan politik.

Setelah tahun 1920 organisasi wanita semakin luas orientasinya terutama dalam menjangkau masyarakat bawah dan tujuan politik dilakukan bersama-sama antara organisasi sosial dan politik. Ketiga jenis perkumpulan (militer, sosial, dan

pemudi terpelajar) walau memiliki perbedaan corak budayanya namun semuanya dapat bekerjasama. Antara tahun 1929-1933 kaum wanita mengubah taktik perjuangannya dengan cara ikut mendukung aksi kaum pergerakan nasional. Gerakan wanita pada masa ini tidak hanya menjadi bagian wanita dari organisasi pergerakan, tetapi sudah menjadi organisasi wanita yang berdiri sendiri secara mandiri.

Paham kebangsaan dan persatuan Indonesia berkembang dalam beberapa jenis organisasi wanita. Organisasi wanita saling membulatkan tekad untuk mendukung persatuan Indonesia. Diilhami oleh semangat Sumpah Pemuda, kaum wanita yang aktif dalam organisasi-organisasi wanita berinisiatif untuk menyatukan gerakan mereka. Semangat persatuan dan kesatuan yang terus berkembang menjadi dasar bagi meningkatnya semangat dan kesadaran nasional. Gagasan tersebut terwujud dalam Kongres Perempuan Pertama. Organisasi-organisasi pemrakarsa Kongres Perempuan Indonesia yakni Wanita Taman Siswa, Wanita Utomo, *Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling* (JIBDA), *Jong Java Dames Afdeeling*, Wanita Katholik, Aisyiyah, dan Putri Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia Pertama dilaksanakan pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Dalem Joyodipuran Yogyakarta. Yogyakarta dipilih karena merupakan tempat tinggal para pemrakarsa. Kongres ini diprakarsai oleh tiga orang tokoh wanita yakni: Ny. Sukonto dari Wanita Utomo, Nyi Hajar Dewantara dari Wanita Taman Siswa dan Ny. Suyatin Kartowiyono dari Putri Indonesia. Kongres ini dihadiri kurang lebih 30 perkumpulan wanita.

Acara kongres berlangsung selama tiga hari tiga malam dengan agenda masing-masing. Hal yang menarik dari pidato-pidato dalam kongres ini bukan hanya isinya yang berbeda-beda namun juga adanya aneka ragam gaya pidato. Tujuan diadakan Kongres Perempuan Indonesia Pertama untuk mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan kehidupan wanita Indonesia. Kongres ini memutuskan untuk mendirikan gabungan perkumpulan wanita dengan nama Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) dan hendak mendirikan *Studiefonds* untuk anak-anak gadis yang pandai tetapi tidak mampu dan memberantas perkawinan anak-anak.

Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia yakni Perikatan Perempuan Indonesia yang didirikan tanggal 25 Desember 1928. Nama federasi kemudian berubah menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII). Antara KPI I dan KPI II diadakan 3 kali Kongres PPII. Pada tanggal 6-8 Mei 1933 dipimpin oleh Ny. Suwandi, PPII mengadakan pertemuan di Jakarta. Para wakil organisasi anggota PPII yang hadir sepakat untuk berinisiatif mengadakan Kongres Perempuan Indonesia Kedua (KPI II) karena banyak organisasi yang baru dibentuk dan belum menjadi anggota PPII. Setelah segala persiapan dianggap cukup, panitia Kongres yang antara lain beranggotakan Ny. Sri Mangunsarkoro, Ny. Suwarni Pringgodigdo, Ny. Abdulrachman dan Ny. Moh. Husni Thamrin mengadakan Kongres Perempuan Indonesia Kedua (KPI II) di Jakarta pada tanggal 20-24 Juli 1935. Jumlah anggota KPI II bertambah besar dibandingkan dengan KPI I.

Kongres Perempuan Indonesia Ketiga (KPI III) diadakan di Bandung tanggal 23-27 Juli 1938 yang dipimpin oleh Ny. Emma Puradireja, Ketua Pasundan Istri Bandung. Berbagai isu yang dibahas dalam kongres ini masih sangat relevan dengan kehidupan kaum wanita saat ini. Masalah reformasi perkawinan diangkat kembali oleh KPI III. Kongres Perempuan Indonesia Keempat (KPI IV) berlangsung di Semarang pada tanggal 25-28 Juli yang dipimpin oleh Ny. Sunaryo Mangunpuspito. Kongres ini merupakan Kongres terakhir sebelum pendudukan Jepang di Indonesia. Kongres menyatakan mendukung penuh tuntutan "Indonesia Berparlemen" dari Gabungan Politik Indonesia (GAPI) serta hak untuk mempersiapkan diri secara militer menghadapi perang mendatang.

6.2 Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut :

- 1) berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Maka apabila terdapat kesenjangan hak, selayaknya diperjuangkan dengan cara yang baik. Seperti yang

dicontohkan oleh organisasi pergerakan wanita masa pergerakan nasional yang mengadakan Kongres Perempuan dalam mencapai tujuannya.

- 2) Bagi para generasi penerus wanita disarankan agar mencontoh semangat dan perjuangan tokoh wanita demi bangsa dan negara serta memiliki pemikiran yang maju demi masa depan negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. dkk. 2010. *Indonesia dalam Arus Sejarah 5: Masa Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Blackburn, S. 2007. *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV.
- Depdikbud. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Firdaningsih, I. *Kongres Perempuan Indonesia Kedua tahun 1935 di Jakarta*. Skripsi. Tidak dipublikasikan. Universitas Indonesia.
- Gottschalk, L. 1969. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Susanto. 1986. Jakarta: UI Press.
- Handayani, Sri, A. 1989. Sumbangsih Wanita dalam Masa Pergerakan Nasional Indonesia (tahun 1920 - tahun 1945). Tidak diterbitkan. *Laporan Penelitian*. Jember: Universitas Jember
- Kartodirjo (1999: 102) dalam bukunya “*Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*”
- Kartowijono, S. 1982. *Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Koentaningrat. 1997 *Metode-metode penelitian masyarakat*. Jakarta: Gramedia pustaka
- Kongres Wanita Indonesia. 1978. *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kristeva 2012. *Manifesto Wacana Kiri*. Yogyakarta: KSP.
- Kuntowijoyo. 2003. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Pustaka.
- Leiriza, R.Z. dkk. (1989). *Sejarah Pemikiran Tentang Sumpah Pemuda*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Mulyono, S. 1969. *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia Djilid II*. Jakarta : P.N Balai Pustaka.
- Nawawi, H. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Notosusanto, N. 1971. *Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sedjarah*. Djakarta: Dephankam.
- Ohorella, G.A . 1992. *Peranan Wanita Indonesia Dalam Masa Pergerakan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita. (1958). *Buku Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, 22 Desember 1928-22 Desember 1958*. Jakarta: Percetakan Negara.
- Poesponegoro, M.D & Notosusanto, N. 2009. *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (± 1900-1942)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pringgodigdo, A.K. 1994. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Ridjal, F. dkk. 1993. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Rochmat, S. 2009. *Ilmu Sejarah Dalam Prespektif Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santosa. A. dkk. *Sejarah Pergerakan Nasional (dari Budi Utomo 1908 hingga Proklamasi Kemerdekaan 1945)*. Diklat. Tidak dipublikasikan. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung
- Soekanto, S. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Soewondo, N. 1984. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia-Indonesia.
- Sudiyo. 2002. *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suhartono. 1994. *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Trimurti, W. 2015. *Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia Pertama tahun 1928 di Yogyakarta*. Skripsi. Tidak dipublikasikan. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Wieringa, S.E. 2010. *Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI*. Yogyakarta: Galang Press.

Wiranatakusuma, M.M. 1984. "Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)". Dalam Yayasan Wanita Pejoang. *Perjuangan Wanita Indonesia 10 Windu Setelah Kartini 1904-1984*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.



MATRIKS PENELITIAN

Tema	Judul	Jenis	Metode	Sifat	Rumusan	Sumber
Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Penelitian	Masalah	Data
Sejarah Nasional	Peranan Kongres Perempuan Indonesia pada Masa Pergerakan Nasional Tahun 1928-1941	Penelitian Sejarah	Metode Penelitian Historis dengan Pendekatan Sosiologi	Studi Literatur	3) bagaimanakah pergerakan wanita pada masa pergerakan nasional Indonesia? 4) bagaimanakah peranan Kongres Perempuan Indonesia masa pergerakan nasional tahun 1928-1941?	1) Buku 2) Skripsi 3) Artikel 4) Laporan Penelitian Yang diperoleh dari: 1) Perpustakaan Universitas Jember 2) Perpustakaan Program Studi Sejarah Universitas Jember 3) Perpustakaan Daerah di Jember

Lampiran B. Gambar-gambar.



Gambar B. 01: Panitia inti Kongres Perempuan Indonesia Pertama

Sumber: Kongres Wanita Indonesia. (1978). *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wani Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.



Gambar B. 02: R.A. Soekonto, Ketua Kongres Perempuan Indonesia Pertama

Sumber: Suratmin dkk. (1991). *Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.



Gambar B. 03: Pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama di Yogyakarta.

Sumber: Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita. (1958). *Buku Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, 22 Desember 1928-22 Desember 1958*. Jakarta: Percetakan Negara.



Gambar B. 04: Diorama Pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama.

Sumber: Dokumentasi Pribadi, koleksi Museum Monumen Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, Yogyakarta.



Gambar B. 05: Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung, 1938.

Sumber : Kongres Wanita Indonesia. (1978). *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Lampiran C. Susunan Pengurus Kongres Perempuan Indonesia Pertama

Susunan Pengurus Kongres Perempuan Indonesia Pertama

- Ketua : R.A Soekonto dari Wanita Utomo
- Wakil Ketua : St. Mundjiah dari Aisyiyah
- Sekretaris I : St Sukaptinah dari JIBDA
- Sekretaris II : Sunarjati dari Puteri Indonesia
- Bendahara I : R. A. Hardjodiningrat dari Wanita Katholik.
- Bendahara II : Sujatin dari Puteri Indonesia
- Anggota : Nyi Hadjar Dewantara dari Wanita Taman Siswa
- Nyonya Drijowongso dari Wanita PSII
- Nyonya Muridan Noto dari Wanita PSII
- Umi Salamah dari Wanita PSII
- Djohanah dari Aisyiyah
- Badiyah Murjati dari Jong Java Dames Afdeeling
- Hajinah dari Aisyiyah
- Ismudiati dari Wanita Utomo
- R.A Mursandi dari Wanita Katholik

Sumber : Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita. (1958). *Buku Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, 22 Desember 1928-22 Desember 1958*. Jakarta: Percetakan Negara.